

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BINTAN NO 1 TAHUN
2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN TABUNG GAS 3 KG
BERSUBSIDI DI KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN
BINTAN**

Jimmi Florensus Pardede¹, Imam Yudhi Prastya², Novi Winarti³

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang

² Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang

³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang
noviwinarti@umrah.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pendistribusian Tabung Gas 3 Kg Bersubsidi Di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kelangkaan tabung gas 3 kg, sehingga pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pendistribusian tabung gas 3 kg bersubsidi. Namun dari data yang diperoleh, data keluarga miskin dan UMKM yang ada masih memiliki perbandingan yang sangat jauh dengan jumlah tabung gas 3 kg bersubsidi yang beredar di kecamatan Bintan Timur. Penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan observasi dan data sekunder diperoleh dari laporan tertulis atau publikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pengawasan Penyaluran Tabung Gas Bersubsidi 3 Kg belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dan penegakan sanksi oleh pemerintah daerah yang mengakibatkan penyaluran tabung gas 3 Kg bersubsidi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Distribusi, Subsidi

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how the implementation of Bintan Regent Regulation No. 1 Of 2019 Concerning Technical Instructions for Supervision Of The Distribution of Subsidized 3 Kg Gas Cylinders In East Bintan District, Bintan Regency. The background of this research is due to the scarcity of 3 kg gas cylinders, so the local government issued regulations governing the distribution of subsidized 3 kg gas cylinders. However, from the data obtained, the existing data on poor families and MSMEs has a very far comparison with the number of subsidized gas cylinders circulating in the East Bintan sub-district. This

study uses the theory of Van Metter and Van Horn. This research uses descriptive qualitative research method. Primary data obtained by means of interviews and observations and secondary data obtained from written reports or publications. The results of the study indicate that the implementation of the Supervision of the Distribution of Subsidized 3 Kg Gas Cylinders has not been going well. This is due to the lack of supervision and enforcement of sanctions by the local government which results in the distribution of subsidized 3 Kg gas cylinders that are not in accordance with applicable regulations.

Keywords: *implementation, public policy, distribution, Subsidies*

1. PENDAHULUAN

Energi merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, energi menjadi sumber utama dalam beraktivitas sehari-hari, tanpa energi manusia tidak akan dapat bertahan hidup di muka bumi ini, Minyak bumi merupakan salah satu bentuk Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak dapat diperbaharui, sehingga dikenal dengan istilah *nonrenewable resources*. Pemanfaatan minyak bumi di dunia khususnya di Indonesia, sudah menjangkau banyak bidang mulai dari rumah tangga hingga industri-industri besar, tentu menjadi sebuah pemborosan besar jika pemerintah terus menerus mengalokasikan APBN untuk beban subsidi, khususnya subsidi minyak tanah yang terus membesar. Berkaitan dengan angka subsidi yang terus mendongkrak dari waktu ke waktu, hingga akhir tahun 2006 subsidi untuk minyak tanah sudah mencapai Rp 40 triliun sedangkan dengan beralih ke gas LPG pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp 15 Triliun artinya pemerintah bisa menghemat sebesar Rp 25 Triliun. (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi)

Tahun 2007 pemerintah akhirnya melakukan program konversi minyak tanah ke *Liquified Petroleum Gas (LPG)*/

Tabung Gas 3 Kg bersubsidi dengan dasar hukum Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri ESDM No.26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Elpiji. Program konversi minyak tanah ke elpiji ini bermaksud untuk mengurangi anggaran APBN tentang minyak tanah menjadi separuhnya. Tujuan dari pengalihan minyak tanah ke elpiji ini antara lain: untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM khususnya minyak tanah, mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi, efisiensi anggaran pemerintah serta menyediakan bahan bakar yang praktis dan bersih untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Jika dihitung, secara kalori penggunaan LPG lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan minyak tanah. Kementerian ESDM menjelaskan bahwa menggunakan elpiji juga bisa mengurangi pengeluaran keluarga kurang mampu, jika pemakaian satu liter minyak tanah ekuivalen dengan 0,4 kg gas LPG, atau satu kg gas gas elpiji setara dengan 3-4 Liter minyak tanah, maka dengan menggunakan elpiji masyarakat akan menghemat Rp 1.700 dibanding minyak tanah.

Berdasarkan uji coba di sejumlah daerah konversi penggunaan elpiji bisa

menghasilkan penghematan Rp. 25.000 per bulan untuk satu KK. Gas elpiji 3 Kg merupakan barang yang paling dicari oleh masyarakat khususnya ibu rumah tangga, sejak program konversi minyak tanah ke gas elpiji 3 Kg sudah menjadi kebutuhan pokok yang sulit tergantikan dengan salah satu hal yang menjadi alasannya karena harganya disubsidi oleh pemerintah, sehingga harga yang diterima oleh konsumen lebih murah dibandingkan dengan gas yang berukuran 12 Kg. seperti yang kita ketahui untuk ukuran tabung gas yang mendapat subsidi dari pemerintah ialah tabung yang berukuran 3 Kg sedangkan untuk tabung yang berukuran 5 Kg dan 12 Kg tidak mendapat subsidi dari pemerintah.

Tabel. 1 Jumlah Keluarga Miskin dan Ukm di Kecamatan Bintan Timur

No Kecamatan	Keluarga Miskin	UKM
1 Kijang Kota	536	691
2 Gunung Lengkuas	158	5
3 Sungai Lekop	133	121
4 Sungai Enam	56	16

Sumber: Kecamatan Bintan Timur dalam angka Tahun 2018-2020

Berdasarkan data jumlah keluarga miskin dan UMKM yang ada di Kecamatan Bintan Timur dari 4 Kelurahan yang ada menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 883 Keluarga Miskin dan 833 UMKM.

Untuk data Tabung Gas 3 Kg bersubsidi yang masuk ke Kecamatan Bintan Timur Berdasarkan olahan peneliti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Pangkalan Lpg 3 Kg dan Jumlah Tabung gas yang masuk ke pangkalan

No Kelurahan	Jumlah	
	Pangkalan Lpg 3 Kg	Jumlah tabung 3 Kg
1 Kijang Kota	50	3000
2 Gunung Lengkuas	12	720
3 Sungai Lekop	7	420
4 Sungai Enam	6	360
Total	75	4500

Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat jika dijumlahkan data keluarga miskin dan UMKM yang ada masih memiliki perbandingan yang sangat jauh dengan jumlah tabung gas 3 Kg bersubsidi yang beredar di kecamatan Bintan Timur, dengan kata lain masih terdapat pendistribusian tabung gas 3 Kg bersubsidi yang tidak tepat sasaran.

Ada beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini namun memiliki perbedaan penggunaan teori , fokus permasalahan dan lokasi penelitian dengan penelitian ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

[1]. Ria Sasmita (2018) Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang. Dalam penelitian ini menggunakan teori dari Kadarman langkah-langkah proses pengawasan, [1], menetapkan standar, [2], Mengukur Kinerja, [3], Memperbaiki Penyimpangan [2]. Triola Ramadan (2018) Pengawasan Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Bersubsidi di Kota Padang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang. Dalam penelitian ini

menggunakan teori T Hami Handoko tentang tahap tahap pengawasan, [1], Penetapan Standar, [2], Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, [3], Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan [4], Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan [5], Pengambilan tindakan koreksi.

[3]. Fadillah Mukmin (2018) Pengendalian Distribusi Gas Bersubsidi di Kota Pekanbaru. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau. Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori Stoner dan Wanked tentang Proses Pengendalian, [1], Menetapkan Hasil yang diinginkan, [2], Menentukan prediktor hasil, [3], menentukan standar atas prediktor dan hasil.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Moelong (2009:135) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Penelitian ini juga menggunakan Observasi yang merupakan proses pengamatan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud untuk merasakan dan memahami fenomena berdasarkan gagasan dan pengetahuan yang sudah diketahui. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Tim Monitoring (Bagian Ekonomi Kabupaten Bintan) : 3 Orang
2. Pangkalan LPG 3 Kg di Kecamatan Bintan Timur : 4 Orang
3. Masyarakat : 3 Orang

4. HASIL PENELITIAN

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkatn program tertentu. Proses implementasi akan baru dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Program kegiatan telah tersusun dan dana sudah tersedia, dan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Implementasi sebagai konsep dan dapat dibagi kedalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, *output* dan *outcome*.

Berdasarkan deskripsi tersebut Implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil sebagai akibat. Untuk melihat bagaimana berjalannya Implementasi Peraturan Bupati Bintan No 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Tabung Gas 3Kg bersubsidi Peneliti menggunakan Teori Van metter dan Van horn yang memiliki 6 Indikator yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik.

5. PEMBAHASAN

Standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan kebijakan.

Identifikasi Indikator- Indikator Kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis Implementasi kebijakan. Indikator – indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan sejauh mana tujuan kebijakan ini telah direalisasikan. Ukuran- ukuran dasar dan tujuan kebijakan berguna dalam menguraikan tujuan kebijakan secara menyeluruh. Untuk kebijakan ini, indikator yang dapat dilihat yakni: Tepat Harga, Tepat Jumlah dan Tepat Sasaran. Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bintan didalamnya sudah diatur sasaran dari tabung gas 3 Kg dan konsumen yang tidak diperbolehkan menggunakan tabung tersebut, mengenai pengguna tabung gas yang masih tidak sesuai dengan kriteria konsumen yang diperbolehkan menjadi konsumen tabung gas 3 Kg bersubsidi.

Sumber daya

Keberhasilan Implementasi Kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan Implementasi Kebijakan. Setiap kebijakan menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga memiliki peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk sumber daya manusia yang dimiliki

dalam kebijakan ini sudah sangat bagus , karena ditangani langsung oleh Bagian Perekonomian Kabupaten Bintan.

Diluar sumber daya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhatikan juga, yaitu sumber daya finansial, karena mau tidak mau , ketika sumber daya manusia yang berkompeten sudah tersedia sedangkan aliran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang akan menjadi persoalan untuk merealisasikan sesuatu yang menjadi tujuan kebijakan publik.

Sumber Implementasi Peraturan Bupati Bintan anggarannya tersedia yaitu anggaran untuk monitoring gabungan yang meliputi rapat instansi terkait dengan agen untuk membahas mengenai hal hal yang harus diketahui atau disosialisasikan untuk pangkalan dan juga masyarakat, dan juga ketika pengawasan atau monitoring kepangkalan bersama Tim yang dilakukan 3-6 Bulan sekali, namun untuk biaya ketika *Monitoring* Harian oleh Bagian Perekonomian hanya sebatas Anggaran Operasional

Karakteristik organisasi pelaksana

Karakteristik Organisasi Pelaksana, Karakteristik Organisasi Pelaksana tidak lepas dari struktur birokrasi yang dapat diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang, aspek yang diteliti lebih lanjut dari karakteristik organisasi pelaksana adalah *Standar Operating Procedure* (SOP) pendistribusian tabung gas 3 Kg bersubsidi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Monitoring

terdapat beberapa tahap yang dilakukan mengenai Pelaksanaan Peraturan Bupati Bintang Pemerintah daerah melalui bagian perekonomian Kabupaten Bintang Melakukan Sosialisasi Terkait Peraturan Bupati Bintang melalui rapat dengan pihak pihak terkait maksimal setelah 6 Bulan Peraturan tersebut di sahkan.

Agen Membuat Laporan Terkait Distribusi Tabung gas 3 Kg meliputi Jumlah dan Pangkalan Tujuan dan memberikan laporan kepada Bagian Perekonomian. Pangkalan Membuat Laporan Penjualan Tabung gas 3 Kg dengan menggunakan *Log Book* dan menyerahkan laporan kepada agen setiap 1 bulan sekali. Bagian Perekonomian membuat laporan atas hasil monitoring ke lapangan dan juga data yang diterima dari agen dan juga pangkalan lalu melaporkannya kepada Bupati.

Pemerintah Kabupaten Bintang membuat Laporan melalui Bagian Perekonomian kepada Pertamina, apabila dalam laporan tersebut ada hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan, maka Pertamina bisa melakukan skorsing/pengurangan alokasi kuota tabung atau bahkan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). Lalu berikut SOP pendistribusian tabung gas 3 Kg di Kabupaten Bintang Agen Membawa Tabung gas dari SPBE ke gudang Agen dan di verifikasi Oleh Petugas berapa jumlah yang dibawa, yang rusak dan yang kosong lalu dituangkan kedalam berita acara. Setelah diverifikasi lalu agen mendistribusikan tabung gas 3 Kg bersubsidi ke pangkalan Kecamatan Bintang Timur dengan harga tebus Rp. 15.750 per Tabung. Pangkalan akan menukar tabung kosong dengan tabung

yang berisi dengan sistem *cash*. Pangkalan akan menjual sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah daerah, yakni Rp. 18.000 per Tabung Untuk Kecamatan Bintang Timur.

Setiap pangkalan dalam menjalankan usahanya wajib melengkapi dan memasang papan nama pangkalan, serta mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan memasangnya ditempat yang mudah diketahui masyarakat. Pangkalan diwajibkan melakukan penjualan /pendistribusian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten.

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Implementasi akan berjalan secara efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memperhatikan kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan yang di komunikasikan dengan berbagai komunikasi.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Zaenal (2017:100), prospek prospek tentang Implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran dan tujuan yang dinyatakan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses Implementasi, maka asumsi asumsi kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu juga sebaliknya.

Ketepatan Komunikasi dengan para pelaksana. Pembahasan sub variabel komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksana ada kaitannya dengan pembahasan sub variabel sebelumnya yaitu, variabel standar dan tujuan kebijakan yang menggambarkan bahwa standar dan tujuan kebijakan sudah sangat jelas namun terdapat kekurangan penegasan dalam penindakan.

Berikut mengenai kriteria masyarakat kelompok sasaran yang diatur dalam Peraturan Bupati Bintang No 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Tabung gas 3 Kg bersubsidi Bukan Merupakan Konsumen Industri/Perusahaan Bukan Merupakan Pegawai Negeri Sipil Bukan Merupakan Anggota POLRI Bukan Merupakan Anggota TNI Ditambah lagi Informasi yang sudah disampaikan dengan jelas kepada seluruh masyarakat yang diberikan oleh pemerintah dalam penentuan kelompok sasaran diantaranya:

Dalam rapat pertemuan antar tim monitoring, selalu di ingatkan bahwa LPG 3 Kg, selalu diingatkan bahwa LPG 3 Kg hanya untuk rumah tangga miskin dan usaha mikro. Hal ini untuk menyatukan persepsi pelaksana kebijakan.

Berbagai himbauan pemerintah di media bahwa sasaran kebijakan LPG 3 Kg bahwasannya hanya untuk rakyat yang tidak mampu hal ini ditujukan agar masyarakat luas mengetahui siapa yang menjadi sasaran kebijakan subsidi LPG 3 Kg. Penambahan tulisan “ Hanya Untuk Masyarakat Miskin” pada tabung gas 3 Kg

Menurut Van Metter dan Van Horn, Implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat-pejabat tinggi (atasan) untuk

mendorong pelaksana (bawahan) bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran dasar dan tujuan kebijakan. Hal ini disebabkan pejabat dan struktur organisasi mempunyai kekuasaan personil ,memiliki kontrol atas alokasi anggaran, kewenangan untuk menanggapi pencapaian kebijakan yang memuaskan atau tidak memuaskan, dan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku bawahan.

Sehingga dari uraian diatas menunjukkan Pemerintah Kabupaten Bintang sudah menunjukkan ukuran dan sasaran kebijakan yang jelas, namun masih terdapat ketidak tegasan dari Tim Monitoring untuk menindak atau memberikan sanksi bagi pangkalan yang mendistribusikan tabung gas 3 Kg yang tidak sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang telah diatur dalam kebijakan diatas.

Sikap para pelaksana

Sikap dan arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan merupakan hal yang (*crucial*). *Implementor* mungkin bisa menjadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi suatu tujuan kebijakan (Van Meter dan Van Horn, 1974). Sebaliknya, Penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut , adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap suatu keberhasilan Implementasi kebijakan. Pada akhirnya intensitas disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Dalam penelitian ini sikap para pelaksana akan lebih diteliti lebih lanjut dari aspek persepsi pelaksana terhadap kebijakan (pemahaman atas tujuan, target dan sasaran kebijakan),

arah respon pelaksana apakah menerima netral atau menolak dan intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman atas target, sasaran dan tujuan kebijakan dari pihak birokrasi Pemerintah Kabupaten Bintan sudah sangat jelas, karena sudah adanya Surat Keputusan Bupati yang menjadi pedoman bagi para pelaksana untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan yang sudah diatur didalam keputusan tersebut.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang harus diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn (1975) adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu untuk mengupayakan implementasi kebijakan harus juga memperhatikan kondisi lingkungan eksternal, dalam penelitian ini, lingkungan sosial ekonomi dan politik yang akan diteliti lebih lanjut adalah perilaku masyarakat, dan aspek perbedaan/perbandingan harga tabung subsidi dengan tabung 5 Kg dan 12 Kg yang dapat memicu preferensi yang bukan dari kelompok sasaran kebijakan subsidi LPG 3 Kg, serta himbauan pemerintah setempat kepada masyarakat.

Aspek perbedaan/perbandingan harga tabung subsidi dengan tabung 5 Kg dan 12 Kg yang dapat memicu preferensi yang bukan dari kelompok sasaran

kebijakan subsidi LPG 3 Kg, serta himbauan pemerintah setempat kepada masyarakat.

Beberapa wawancara dengan kelompok pengguna LPG 3 Kg yang bukan merupakan kelompok sasaran kebijakan, dapat diambil beberapa hal yang membuat mereka menggunakan tabung gas LPG 3 Kg. Mereka tidak pernah mendapat larangan atau informasi tidak boleh menggunakan tabung gas subsidi LPG 3 Kg. Beberapa masyarakat mengetahui bahwa bukan merupakan kelompok sasaran kebijakan, namun karena adanya perbedaan harga yang cukup jauh antara tabung gas 3 Kg, 5 Kg dan 12 Kg membuat masyarakat lebih memilih menggunakan tabung gas 3 Kg. Alasan berat tabung dan kemudahan membawa tabung tersebut ketika membeli dari pangkalan menjadi alasan masyarakat tertentu, terutama para ibu rumah tangga.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Peraturan Bupati Bintan No 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pendistribusian Tabung gas 3 Kg Bersubsidi di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara menyeluruh, dikarenakan masih banyaknya hal hal yang terjadi tidak sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Diantaranya masih ditemukan pengecer yang menjual tabung gas 3 Kg bersubsidi, kemudian masih terdapat konsumen yang bukan merupakan kelompok sasaran subsidi yang menggunakan tabung gas 3

Kg bersubsidi. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa masih belum terpenuhinya subsidi tabung gas 3 Kg yang tepat harga, tepat jumlah dan tepat sasaran.

7. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Winarno, Budi. (2008) Kebijakan Publik. (Teori, Proses dan Studi Kasus). Yogyakarta : CAPS.
- [2] Sugiyono, (2006) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.
- [3] Agustinus, (2006) Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
- [4] Moleong, Lexy,J. (2010) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- [5] Agustino, Leo. (2017) Dasar Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Cv.
- [6] Ria Sasmita (2018) Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.
- [7] Triola Ramadhan (2018) Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Padang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Padang.
- [8] Fadillah Mukmin (2018) Pengendalian Distribusi Gas Bersubsidi di Kota Pekanbaru. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Pekanbaru.
- [9] Peraturan Bupati Bintan No 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Tabung Gas 3 Kg Bersubsidi di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.
- [10] Kecamatan Bintan Timur dalam Angka Tahun 2018.
- [11] Kecamatan Bintan Timur dalam Angka Tahun 2020.
- [12] Konversi Minyak Tanah ke Gas Oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.